

Katalog BPS : 2331.

**DATA DAN INFORMASI
KEMISKINAN**

Tahun 2004

BUKU 1 : PROVINSI

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2004

BUKU 1: PROVINSI

BPS *Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia*

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2004
BUKU 1: PROVINSI

ISBN : 979-724-289-7

Katalog BPS : 2331.

No. Publikasi : 06310.0501

Ukuran buku : 16,5 cm x 22 cm

Naskah :

Sub Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Analisis Statistik Lintas Sektor

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Tim Penyusun

Penanggung jawab/Pengarah : Wynandin Imawan
Koordinator : Hamonangan Ritonga
Anggota : 1. Ahmad Avenzora
2. Wachyu Winarsih
3. Harmawanti Marhaeni
4. Jeffry RHS
5. Julita L BR Aritonang
6. Rustam
7. Antoreinette Mangiri

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Buku 1 (satu) Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2004 ini merupakan hasil penghitungan data Susenas 2004 untuk tingkat provinsi. Buku ini disajikan sebagai tindak lanjut dari ditunjuknya Badan Pusat Statistik sebagai Koordinator Kelompok Kerja Data dan Informasi dalam Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi Tim Kerja Komite Penanggulangan Kemiskinan tingkat Pusat dan Daerah dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Desember 2004
Kepala Badan Pusat Statistik,

DR. Choiril Maksum

NIP. 340003890

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. KEMISKINAN	
<i>Ulasan Singkat</i>	1
<i>Penjelasan Teknis</i>	2
Tabel 1.1a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2002 (Persentase terhadap total penduduk provinsi)	5
Tabel 1.1b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2002 (Persentase terhadap total penduduk miskin nasional).....	6
Tabel 1.2a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2003 (Persentase terhadap total penduduk provinsi)	7
Tabel 1.2b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin nasional).....	8
Tabel 1.3a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk provinsi)	9
Tabel 1.3b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2003 (Persentase terhadap total penduduk miskin nasional).....	10
Tabel 1.4. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rp/Kap/Bln), Tahun 2003-2004.....	11
Tabel 1.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2001-2004..	12
Tabel 1.6a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk provinsi).....	13
Tabel 1.6b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin nasional).....	14
Tabel 1.7a. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumahtangga, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi).....	15
Tabel 1.7b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumahtangga, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin nasional).....	16
Tabel 1.8. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi).....	17
Tabel 1.9. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumahtangga, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi).....	18
Tabel 1.10. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumahtangga, Tahun 2004 (Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi).....	19

	Halaman
BAB II. PENDIDIKAN	
<i>Ulasan Singkat</i>	21
<i>Penjelasan Teknis</i>	22
Tabel 2.1.a. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2004, Miskin	23
Tabel 2.1.b. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi, Tahun 2004, Tidak Miskin	24
Tabel 2.1.c. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi, Tahun 2004, Miskin + Tidak Miskin	25
Tabel 2.2. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 7-12 Tahun Menurut Provinsi, Tahun 2002-2004	26
Tabel 2.3. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15 Tahun Menurut Provinsi, Tahun 2002-2004	27
BAB III KETENAGAKERJAAN	
<i>Ulasan Singkat</i>	29
<i>Penjelasan Teknis</i>	30
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja per Minggu Tahun 2004.....	31
Tabel 3.2. Persentase Pekerja Informal Menurut Propinsi Tahun 2003 dan 2004	32
BAB IV FERTILITAS, MORTALITAS DAN HARAPAN HIDUP	
<i>Ulasan Singkat</i>	33
<i>Penjelasan Teknis</i>	33
Tabel 4.1. Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Balita (${}_5q_5$), Angka Harapan Hidup (e_0), dan Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi, 2002-2003.....	34
BAB V KESEHATAN DAN GIZI	
<i>Ulasan Singkat</i>	35
<i>Penjelasan Teknis</i>	35
Tabel 5.1.a. Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Menurut Provinsi, Tahun 2004 , Miskin	36
Tabel 5.1.b. Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Menurut Provinsi, Tahun 2004 , Tidak Miskin.	37
Tabel 5.1.c. Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Menurut Provinsi, Tahun 2004 , Miskin + Tidak Miskin	38
Tabel 5.2. Persentase Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Persentase Pengguna Alat KB Menurut Provinsi, Tahun 2004	39
Tabel 5.2. Persentase Pengguna Alat KB Menurut Provinsi, Tahun 2004	40

	Halaman
BAB VI. FASILITAS PERUMAHAN	
<i>Ulasan Singkat</i>	41
<i>Penjelasan Teknis.....</i>	41
Tabel 6.1.a Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/ Bersama dan Listrik serta dengan Lantai Terluas dari Tanah, Tahun 2004, Miskin	42
Tabel 6.1.b Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/ Bersama dan Listrik serta dengan Lantai Terluas dari Tanah, Tahun 2004, Tidak Miskin	43
Tabel 6.1.c Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/ Bersama dan Listrik serta dengan Lantai Terluas dari Tanah, Tahun 2004, Tahun 2004, Miskin +Tidak Miskin	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I. KEMISKINAN

Ulasan Singkat

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Susenas.

Sejak tahun 1981, setiap tiga tahun sekali, dengan data modul konsumsi Susenas BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi.

Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin absolut secara nasional tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1.3a). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan jumlah penduduk miskin secara nasional dalam periode 2003-2004 menurun sebesar 3,19 persen. Sedangkan dilihat dari persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), penduduk miskin di perdesaan (20,11 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (12,13 persen). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurut daerah dalam periode 2003-2004 terjadi penurunan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dimana masing-masing daerah mengalami penurunan sebesar 7,30 persen dan 1,19 persen.

Dari angka kemiskinan tahun 2004 antar provinsi terlihat bahwa ada enam provinsi yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10 persen). Keenam provinsi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung (9,07 persen), Provinsi Sulawesi Utara (8,94 persen), Provinsi Banten (8,58 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (7,19 persen), Provinsi Bali (6,85 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (3,18 persen). Dari 24 provinsi lainnya, masing-masing terdapat 11 provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin antara 10-20 persen dan 20-30 persen, serta hanya 2 provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 30 persen. Dua provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar (di atas 30 persen) adalah Provinsi Papua (38,69 persen) dan Provinsi Maluku (32,13 persen). Sedangkan lima provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dalam kelompok 20-30 persen adalah Provinsi Gorontalo (29,01 persen), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (28,47 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,86 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (25,38 persen), dan Provinsi Bengkulu (22,39 persen). Serta lima provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dalam kelompok 10-20 persen adalah Provinsi DI Yogyakarta (19,06 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (14,97 persen), Provinsi Sumatera Utara (14,92 persen), Provinsi Kalimantan Barat (13,93 persen), dan Provinsi Riau (13,15 persen).

Dari Tabel 1.3b. dapat dilihat distribusi penduduk miskin secara nasional pada tahun 2004 menurut daerah. Distribusi secara nasional menunjukkan bahwa 31,45 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 68,55 persen sisanya berada di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan. Demikian

pula hal tersebut terjadi jika dilihat menurut provinsi. Kondisi ini turut menguatkan keberadaan penduduk miskin di Indonesia secara umum yang terkonsentrasi di daerah perdesaan, terlihat dari distribusi penduduk miskin di daerah perdesaan sekitar dua kali lipat di daerah perkotaan. Ada tiga provinsi yang memiliki kontribusi lebih dari 10 persen penduduk miskin di wilayahnya terhadap total penduduk miskin Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur (20,23 persen), Provinsi Jawa Tengah (18,93 persen), dan Provinsi Jawa Barat (12,88 persen).

Penjelasan Teknis

1. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan *basic needs*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.
2. Berdasarkan pendekatan *basic needs*, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index (HCI)* yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
3. GK dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas perkiraan awal GK. Perkiraan awal GK ini dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang *diiinflate/dideflate* dengan inflasi/deflasi. GK dibagi ke dalam dua bagian yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
4. Batas kecukupan makanan (pangan) dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Sejak tahun 1993 penghitungan kecukupan kalori ini didasarkan pada 52 komoditi makanan terpilih yang telah disesuaikan dengan pola konsumsi penduduk.
5. Batas kecukupan non makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sementara itu sejak tahun 1996 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan. Uraian yang lebih rinci mengenai pemilihan komoditi non makanan ini dapat dilihat pada publikasi Susenas Mini 1999 "Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS".

6. Penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan yang cukup mendasar dilakukan pada penghitungan tahun 1999. Perubahan standard ini meliputi perluasan cakupan komoditi bukan makanan yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar. Disamping itu penyempurnaan dilakukan pula dengan mengukur keterbandingan antar daerah (propinsi serta perkotaan-perdesaan) dan antar waktu yang disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat harga antar daerah yaitu dengan cara melakukan standardisasi harga terhadap harga di DKI Jakarta.
7. Penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan berdasarkan GK (GKM+GKNM) yang juga dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan. Jumlah dan persentase penduduk miskin secara nasional (Indonesia) merupakan kumulatif dari jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia yang juga dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan. Disamping itu, informasi penduduk miskin ini juga disajikan dalam bentuk distribusinya dan dikaitkan dengan berbagai karakteristik rumahtangga (penduduk) antara lain jenis kelamin, jenis kelamin kepala rumahtangga, pendidikan kepala rumahtangga, lapangan pekerjaan kepala rumahtangga, dan status pekerjaan kepala rumahtangga.
8. Data yang disajikan pada publikasi ini adalah data kemiskinan tahun 2002-2004 yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk provinsi-provinsi yang tidak dilakukan Susenas pada tahun 2002, maka dilakukan estimasi untuk provinsi-provinsi tersebut. Provinsi-provinsi tersebut antara lain: Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua. Estimasi untuk tiga provinsi (Maluku, Maluku Utara dan Papua) dilakukan dengan mengasumsikan persentase penduduk miskin sama dengan data tahun sebelumnya yang tersedia. Khusus untuk Provinsi NAD, metode estimasi yang digunakan adalah seperti berikut:
Asumsi: Tingkat pendapatan masyarakat tetap selama periode 1999-2002.
Rata-rata tingkat kenaikan harga (inflasi) di Provinsi NAD selama periode 1999-2000 adalah sekitar 1 persen, periode 1999-2001 sekitar 10 persen dan periode 1999-2002 adalah 30 persen. Dari data yang ada dapat dihitung bahwa setiap kenaikan harga (inflasi) sekitar 10 persen akan menaikkan persentase penduduk miskin sekitar 30 persen (asumsi pendapatan masyarakat tetap). Dengan demikian, persentase penduduk miskin NAD tahun 2000 diperkirakan meningkat sekitar 3 persen dari tahun 1999; tahun 2001 meningkat sekitar 30 persen dari tahun 1999 dan tahun 2002 meningkat hampir 100 persen atau menjadi dua kali lipat dari tahun 1999.
9. Penghitungan angka kemiskinan tahun 2004 didasarkan pada data Susenas tahun 2004, yaitu Susenas Modul Konsumsi tahun 2004 (panel) untuk penghitungan kemiskinan tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, serta Susenas Kor tahun 2004 untuk penghitungan kemiskinan tingkat provinsi.
10. Indikator lain yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index*- P_2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbecke* (1984) menurut perkotaan dan perdesaan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana: $\alpha = 0, 1, 2$

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0); $\alpha=1$ adalah *Poverty Gap Index* (P_1); dan $\alpha=2$ merupakan ukuran *Distributionally Sensitive Index* (P_2). *Poverty Gap Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. *Distributionally Sensitive Index* (P_2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Tabel 1.1.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2002
(Persentase terhadap total penduduk provinsi)

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam ¹⁾	201,10	20,09	998,80	33,06	1.199,90	29,83
Sumatera Utara	698,83	13,60	1.185,07	17,55	1.883,89	15,84
Sumatera Barat	173,65	13,34	322,71	10,80	496,36	11,57
Riau	178,78	7,40	543,63	18,79	722,41	13,61
Jambi	138,40	19,04	188,51	10,76	326,91	13,18
Sumatera Selatan	573,46	22,62	1.027,14	22,16	1.600,60	22,32
Bengkulu	129,51	25,60	242,91	21,41	372,42	22,70
Lampung	345,14	22,42	1.305,55	24,53	1.650,69	24,05
Bangka Belitung	38,87	9,98	67,32	12,84	106,19	11,62
DKI Jakarta	286,88	3,42	—	—	286,88	3,42
Jawa Barat	2.647,05	13,62	2.291,16	13,10	4.938,20	13,38
Jawa Tengah	2.762,28	20,50	4.546,05	24,96	7.308,33	23,06
DI Yogyakarta	303,75	16,17	331,91	25,96	635,66	20,14
Jawa Timur	2.859,00	18,90	4.842,15	24,18	7.701,15	21,91
Banten	305,84	6,47	480,85	12,64	786,69	9,22
Bali	98,88	5,72	122,88	8,25	221,76	6,89
Nusa Tenggara Barat	537,38	34,10	608,43	23,84	1.145,81	27,76
Nusa Tenggara Timur	135,24	21,49	1.071,26	32,51	1.206,49	30,74
Kalimantan Barat	185,49	17,47	458,71	14,77	644,20	15,46
Kalimantan Tengah	42,33	7,45	189,06	13,71	231,39	11,88
Kalimantan Selatan	77,60	6,76	182,20	9,56	259,80	8,51
Kalimantan Timur	75,73	5,17	237,31	21,58	313,04	12,20
Sulawesi Utara	36,59	4,66	192,72	15,31	229,32	11,22
Sulawesi Tengah	89,17	20,04	475,43	26,08	564,60	24,89
Sulawesi Selatan	176,95	7,16	1.132,28	19,61	1.309,23	15,88
Sulawesi Tenggara	43,53	10,69	420,30	27,87	463,84	24,22
Gorontalo	52,92	22,94	221,75	35,52	274,68	32,12
Maluku ¹⁾	40,20	12,76	378,60	42,83	418,80	34,78
Maluku Utara ¹⁾	34,80	13,17	75,30	14,25	110,10	14,03
Papua ¹⁾	49,30	9,76	935,40	51,21	984,70	41,80
Indonesia	13.318,70	14,46	25.075,30	21,10	38.394,00	18,20

Sumber : Diolah dari Susenas Modul 2002

Catatan : ¹⁾ Angka estimasi, karena tidak dilakukan Susenas

Tabel 1.1.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2002
(Persentase terhadap total penduduk miskin nasional)

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam ¹⁾	201,10	1,51	998,80	3,98	1.199,90	3,13
Sumatera Utara	698,83	5,25	1.185,07	4,73	1.883,89	4,91
Sumatera Barat	173,65	1,30	322,71	1,29	496,36	1,29
Riau	178,78	1,34	543,63	2,17	722,41	1,88
Jambi	138,40	1,04	188,51	0,75	326,91	0,85
Sumatera Selatan	573,46	4,31	1.027,14	4,10	1.600,60	4,17
Bengkulu	129,51	0,97	242,91	0,97	372,42	0,97
Lampung	345,14	2,59	1.305,55	5,21	1.650,69	4,30
Bangka Belitung	38,87	0,29	67,32	0,27	106,19	0,28
DKI Jakarta	286,88	2,15	—	—	286,88	0,75
Jawa Barat	2.647,05	19,87	2.291,16	9,14	4.938,20	12,86
Jawa Tengah	2.762,28	20,74	4.546,05	18,13	7.308,33	19,04
DI Yogyakarta	303,75	2,28	331,91	1,32	635,66	1,66
Jawa Timur	2.859,00	21,47	4.842,15	19,31	7.701,15	20,06
Banten	305,84	2,30	480,85	1,92	786,69	2,05
Bali	98,88	0,74	122,88	0,49	221,76	0,58
Nusa Tenggara Barat	537,38	4,03	608,43	2,43	1.145,81	2,98
Nusa Tenggara Timur	135,24	1,02	1.071,26	4,27	1.206,49	3,14
Kalimantan Barat	185,49	1,39	458,71	1,83	644,20	1,68
Kalimantan Tengah	42,33	0,32	189,06	0,75	231,39	0,60
Kalimantan Selatan	77,58	0,58	182,19	0,73	259,78	0,68
Kalimantan Timur	75,73	0,57	237,31	0,95	313,04	0,82
Sulawesi Utara	36,59	0,27	192,72	0,77	229,32	0,60
Sulawesi Tengah	89,17	0,67	475,43	1,90	564,60	1,47
Sulawesi Selatan	176,95	1,33	1.132,28	4,52	1.309,23	3,41
Sulawesi Tenggara	43,53	0,33	420,30	1,68	463,84	1,21
Gorontalo	52,92	0,40	221,75	0,88	274,68	0,72
Maluku ¹⁾	40,20	0,30	378,60	1,51	418,80	1,09
Maluku Utara ¹⁾	34,80	0,26	75,30	0,30	110,10	0,29
Papua ¹⁾	45,40	0,37	862,20	3,73	907,60	2,57
Indonesia	13.318,70	100,00	25.075,30	100,00	38.394,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Modul 2002

Catatan : ¹⁾ Angka estimasi, karena tidak dilakukan Susenas

Tabel 1.2.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2003
(Persentase terhadap total penduduk provinsi)

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	223,9	19,47	1.030,3	33,63	1.254,2	29,76
Sumatera Utara	686,3	13,41	1.197,3	17,77	1.883,6	15,89
Sumatera Barat	184,8	14,10	316,3	10,06	501,1	11,24
Riau	178,7	7,47	572,6	18,08	751,3	13,52
Jambi	134,6	18,53	192,7	10,46	327,3	12,74
Sumatera Selatan	459,8	21,05	937,3	21,79	1.397,1	21,54
Bengkulu	110,6	26,11	233,6	21,36	344,2	22,69
Lampung	318,7	21,36	1.249,3	22,98	1.568,0	22,63
Bangka Belitung	37,0	8,94	61,2	10,89	98,2	10,06
DKI Jakarta	294,1	3,42	-	-	294,1	3,42
Jawa Barat	2.445,3	12,71	2.453,7	13,09	4.899,0	12,90
Jawa Tengah	2.520,3	19,66	4.459,7	23,19	6.980,0	21,78
DI Yogyakarta	303,3	16,44	333,5	24,48	636,8	19,86
Jawa Timur	2.474,6	16,84	5.103,8	23,74	7.578,4	20,93
Banten	309,4	6,62	546,4	12,76	855,8	9,56
Bali	99,7	6,14	146,4	8,48	246,1	7,34
Nusa Tenggara Barat	486,0	34,64	568,8	21,86	1.054,8	26,34
Nusa Tenggara Timur	126,0	19,33	1.040,0	30,40	1.166,0	28,63
Kalimantan Barat	165,8	15,81	417,9	14,42	583,7	14,79
Kalimantan Tengah	41,3	8,10	166,4	12,64	207,7	11,37
Kalimantan Selatan	76,0	6,54	183,0	9,09	259,0	8,16
Kalimantan Timur	94,8	6,40	233,8	19,11	328,6	12,15
Sulawesi Utara	36,5	4,62	155,1	11,60	191,6	9,01
Sulawesi Tengah	79,1	17,61	430,0	24,42	509,1	23,04
Sulawesi Selatan	173,4	7,15	1.128,5	19,49	1.301,8	15,85
Sulawesi Tenggara	39,4	9,86	389,0	26,36	428,4	22,84
Gorontalo	44,6	19,98	213,1	32,39	257,7	29,25
Maluku	41,9	12,53	358,0	40,56	399,9	32,85
Maluku Utara	27,2	13,25	91,6	14,13	118,8	13,92
Papua	50,6	8,32	866,4	49,75	917,0	39,03
Indonesia	12.263,7	13,57	25.075,7	20,23	37.339,4	17,42

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2003

Tabel 1.2.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2003
(Persentase terhadap total penduduk miskin nasional)

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	223,9	1,83	1.030,3	4,11	1.254,2	3,36
Sumatera Utara	686,3	5,60	1.197,3	4,77	1.883,6	5,04
Sumatera Barat	184,8	1,51	316,3	1,26	501,1	1,34
Riau	178,7	1,46	572,6	2,28	751,3	2,01
Jambi	134,6	1,10	192,7	0,77	327,3	0,88
Sumatera Selatan	459,8	3,75	937,3	3,74	1.397,1	3,74
Bengkulu	110,6	0,90	233,6	0,93	344,2	0,92
Lampung	318,7	2,60	1.249,3	4,98	1.568,0	4,20
Bangka Belitung	37,0	0,30	61,2	0,24	98,2	0,26
DKI Jakarta	294,1	2,40	-	-	294,1	0,79
Jawa Barat	2.445,3	19,94	2.453,7	9,79	4.899,0	13,12
Jawa Tengah	2.520,3	20,55	4.459,7	17,78	6.980,0	18,69
DI Yogyakarta	303,3	2,47	333,5	1,33	636,8	1,71
Jawa Timur	2.474,6	20,18	5.103,8	20,35	7.578,4	20,30
Banten	309,4	2,52	546,4	2,18	855,8	2,29
Bali	99,7	0,81	146,4	0,58	246,1	0,66
Nusa Tenggara Barat	486,0	3,96	568,8	2,27	1.054,8	2,82
Nusa Tenggara Timur	126,0	1,03	1.040,0	4,15	1.166,0	3,12
Kalimantan Barat	165,8	1,35	417,9	1,67	583,7	1,56
Kalimantan Tengah	41,3	0,34	166,4	0,66	207,7	0,56
Kalimantan Selatan	76,0	0,62	183,0	0,73	259,0	0,69
Kalimantan Timur	94,8	0,77	233,8	0,93	328,6	0,88
Sulawesi Utara	36,5	0,30	155,1	0,62	191,6	0,51
Sulawesi Tengah	79,1	0,64	430,0	1,71	509,1	1,36
Sulawesi Selatan	173,4	1,41	1.128,5	4,50	1.301,8	3,49
Sulawesi Tenggara	39,4	0,32	389,0	1,55	428,4	1,15
Gorontalo	44,6	0,36	213,1	0,85	257,7	0,69
Maluku	41,9	0,34	358,0	1,43	399,9	1,07
Maluku Utara	27,2	0,22	91,6	0,37	118,8	0,32
Papua	50,6	0,41	866,4	3,46	917,0	2,46
Indonesia	12.263,7	100,00	25.075,7	100,00	37.339,4	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2003

Tabel 1.3.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2004
(Persentase terhadap total penduduk provinsi)

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	198,4	17,58	958,8	32,66	1.157,2	28,47
Sumatera Utara	633,4	12,02	1.166,7	17,19	1.800,1	14,93
Sumatera Barat	167,8	12,28	304,6	9,67	472,4	10,46
Riau	160,5	6,44	583,9	18,36	744,4	13,12
Jambi	130,8	17,34	194,3	10,46	325,1	12,45
Sumatera Selatan	455,1	20,13	924,2	21,33	1.379,3	20,92
Bengkulu	112,8	25,43	232,3	21,16	345,1	22,39
Lampung	317,3	20,17	1.244,4	22,81	1.561,7	22,22
Bangka Belitung	33,0	7,73	58,8	10,06	91,8	9,07
DKI Jakarta	277,1	3,18	-	-	277,1	3,18
Jawa Barat	2.243,2	11,21	2.411,0	13,08	4.654,2	12,10
Jawa Tengah	2.346,5	17,52	4.497,3	23,64	6.843,8	21,11
DI Yogyakarta	301,4	15,96	314,8	23,65	616,2	19,14
Jawa Timur	2.230,6	14,62	5.081,9	24,02	7.312,5	20,08
Banten	279,9	5,69	499,3	11,99	779,2	8,58
Bali	87,0	5,05	144,9	8,71	231,9	6,85
Nusa Tenggara Barat	492,5	32,66	539,1	21,09	1.031,6	25,38
Nusa Tenggara Timur	122,7	18,11	1.029,4	29,77	1.152,1	27,86
Kalimantan Barat	143,8	13,29	414,4	14,15	558,2	13,91
Kalimantan Tengah	33,0	6,13	161,1	12,20	194,1	10,44
Kalimantan Selatan	63,5	5,28	167,5	8,33	231,0	7,19
Kalimantan Timur	84,3	5,63	233,9	18,68	318,2	11,57
Sulawesi Utara	35,9	4,37	156,3	11,76	192,2	8,94
Sulawesi Tengah	70,5	15,33	415,8	23,33	486,3	21,69
Sulawesi Selatan	152,2	6,11	1.089,3	18,65	1.241,5	14,90
Sulawesi Tenggara	38,0	9,21	380,4	25,39	418,4	21,90
Gorontalo	43,7	18,63	215,4	32,70	259,1	29,01
Maluku	41,1	11,99	356,5	39,86	397,6	32,13
Maluku Utara	23,9	10,50	83,9	13,10	107,8	12,42
Papua	49,1	7,71	917,7	49,28	966,8	38,69
Indonesia	11.369,0	12,13	24.777,9	20,11	36.146,9	16,66

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.3.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Tahun 2004
(Persentase terhadap total penduduk miskin nasional)

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	198,4	1,75	958,8	3,87	1.157,2	3,20
Sumatera Utara	633,4	5,57	1.166,7	4,71	1.800,1	4,98
Sumatera Barat	167,8	1,48	304,6	1,23	472,4	1,31
Riau	160,5	1,41	583,9	2,36	744,4	2,06
Jambi	130,8	1,15	194,3	0,78	325,1	0,90
Sumatera Selatan	455,1	4,00	924,2	3,73	1.379,3	3,82
Bengkulu	112,8	0,99	232,3	0,94	345,1	0,95
Lampung	317,3	2,79	1.244,4	5,02	1.561,7	4,32
Bangka Belitung	33,0	0,29	58,8	0,24	91,8	0,25
DKI Jakarta	277,1	2,44	-	-	277,1	0,77
Jawa Barat	2.243,2	19,73	2.411,0	9,73	4.654,2	12,88
Jawa Tengah	2.346,5	20,64	4.497,3	18,15	6.843,8	18,93
DI Yogyakarta	301,4	2,65	314,8	1,27	616,2	1,70
Jawa Timur	2.230,6	19,62	5.081,9	20,51	7.312,5	20,23
Banten	279,9	2,46	499,3	2,02	779,2	2,16
Bali	87,0	0,77	144,9	0,58	231,9	0,64
Nusa Tenggara Barat	492,5	4,33	539,1	2,18	1.031,6	2,85
Nusa Tenggara Timur	122,7	1,08	1.029,4	4,15	1.152,1	3,19
Kalimantan Barat	143,8	1,26	414,4	1,67	558,2	1,54
Kalimantan Tengah	33,0	0,29	161,1	0,65	194,1	0,54
Kalimantan Selatan	63,5	0,56	167,5	0,68	231,0	0,64
Kalimantan Timur	84,3	0,74	233,9	0,94	318,2	0,88
Sulawesi Utara	35,9	0,32	156,3	0,63	192,2	0,53
Sulawesi Tengah	70,5	0,62	415,8	1,68	486,3	1,35
Sulawesi Selatan	152,2	1,34	1.089,3	4,40	1.241,5	3,43
Sulawesi Tenggara	38,0	0,33	380,4	1,54	418,4	1,16
Gorontalo	43,7	0,38	215,4	0,87	259,1	0,72
Maluku	41,1	0,36	356,5	1,44	397,6	1,10
Maluku Utara	23,9	0,21	83,9	0,34	107,8	0,30
Papua	49,1	0,43	917,7	3,70	966,8	2,67
Indonesia	11.369,0	100,00	24.777,9	100,00	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.4. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rp/Kap/Bln) , Tahun 2003-2004

Provinsi	Perkotaan [K]		Pedesaan [D]		K+D	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	137.440	141.926	104.855	124.857	123.998	129.615
Sumatera Utara	141.771	142.966	95.926	114.214	117.187	122.414
Sumatera Barat	155.936	181.506	117.667	128.610	137.095	144.704
Riau	178.016	198.075	134.202	164.921	168.391	179.589
Jambi	150.899	160.203	101.585	117.428	125.065	129.805
Sumatera Selatan	140.805	154.768	95.214	108.457	118.398	124.353
Bengkulu	135.203	148.156	96.461	102.335	110.975	115.569
Lampung	135.357	146.566	99.922	108.611	111.092	117.135
Bangka Belitung	152.916	162.288	122.758	143.114	144.233	151.243
DKI Jakarta	186.525	197.306	-	-	186.525	197.306
Jawa Barat	135.598	152.144	99.969	122.475	130.503	137.929
Jawa Tengah	130.809	140.391	103.700	116.998	119.403	126.651
DI Yogyakarta	137.132	148.247	106.801	114.671	127.089	134.371
Jawa Timur	131.594	138.792	112.855	119.405	121.695	127.524
Banten	148.552	150.384	107.311	115.988	126.214	133.534
Bali	158.415	158.639	130.668	136.166	141.179	147.617
Nusa Tenggara Barat	122.411	144.001	94.588	99.686	112.960	116.145
Nusa Tenggara Timur	130.433	142.351	87.018	94.886	97.387	102.695
Kalimantan Barat	147.779	160.491	96.429	103.400	112.664	118.838
Kalimantan Tengah	134.788	148.964	114.357	128.382	127.152	134.374
Kalimantan Selatan	141.407	148.413	94.969	111.821	114.151	121.879
Kalimantan Timur	163.815	163.976	145.460	170.296	156.491	165.755
Sulawesi Utara	147.151	148.343	115.686	132.207	134.202	136.470
Sulawesi Tengah	143.306	154.043	110.040	116.373	117.284	124.133
Sulawesi Selatan	127.597	136.222	98.946	107.309	106.765	109.979
Sulawesi Tenggara	128.687	140.925	104.199	108.260	108.405	111.018
Gorontalo	114.907	126.612	91.095	94.889	100.926	103.247
Maluku	135.425	152.194	120.030	123.769	128.430	131.654
Maluku Utara	129.442	174.000	91.734	107.142	117.355	124.713
Papua	154.905	160.866	119.568	130.649	125.065	135.558
Indonesia	138.803	143.455	105.888	108.725	118.554	122.775

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2003 & 2004

Tabel 1.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Menurut Provinsi, Tahun 2002 – 2004

Provinsi	2002		2003		2004	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam ¹⁾	4,32	1,00	6,73	2,12	6,32	1,98
Sumatera Utara	2,63	0,65	2,63	0,66	2,32	0,59
Sumatera Barat	1,81	0,43	1,74	0,43	1,52	0,37
Riau	2,01	0,48	2,46	0,66	2,28	0,70
Jambi	2,38	0,71	2,09	0,55	2,04	0,54
Sumatera Selatan	3,60	0,95	4,16	1,16	3,98	1,09
Bengkulu	3,39	0,83	4,03	1,03	3,82	0,98
Lampung	4,18	1,12	4,26	1,17	4,12	1,12
Bangka Belitung	1,44	0,31	1,53	0,34	1,35	0,31
DKI Jakarta	0,39	0,07	0,49	0,11	0,42	0,09
Jawa Barat	2,21	0,56	2,20	0,56	1,91	0,48
Jawa Tengah	4,00	1,05	3,93	1,07	3,58	0,97
DI Yogyakarta	3,81	1,07	3,91	1,09	3,52	0,96
Jawa Timur	3,88	1,03	3,80	1,02	3,42	0,92
Banten	1,27	0,29	1,49	0,36	1,26	0,30
Bali	0,95	0,21	1,05	0,24	0,92	0,21
Nusa Tenggara Barat	5,01	1,28	4,87	1,32	4,35	1,16
Nusa Tenggara Timur	6,48	1,97	5,61	1,64	5,12	1,48
Kalimantan Barat	2,39	0,60	2,62	0,71	2,28	0,60
Kalimantan Tengah	2,04	0,57	2,15	0,70	1,98	0,68
Kalimantan Selatan	1,11	0,23	1,22	0,28	1,04	0,24
Kalimantan Timur	1,90	0,46	2,27	0,63	2,06	0,60
Sulawesi Utara	1,54	0,36	1,81	0,56	1,80	0,54
Sulawesi Tengah	4,46	1,21	4,58	1,32	4,03	1,14
Sulawesi Selatan	2,78	0,75	2,73	0,73	2,42	0,63
Sulawesi Tenggara	4,81	1,44	4,13	1,08	3,80	0,98
Gorontalo	6,20	1,79	7,02	2,43	6,95	2,32
Maluku ¹⁾	6,78	1,96	6,76	1,96	6,32	1,82
Maluku Utara ¹⁾	2,63	0,75	2,08	0,50	2,06	0,45
Papua ¹⁾	7,91	2,25	10,69	4,00	10,56	5,01
Indonesia	3,01	0,79	3,13	0,85	2,89	0,78

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2002, 2003 & 2004

Catatan : ¹⁾ Angka estimasi, karena tidak dilakukan Susenas

Tabel 1.6.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2004
(Persentase terhadap total penduduk provinsi)

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	583,8	28,81	573,4	28,14	1.157,2	28,47
Sumatera Utara	885,8	14,69	914,3	15,17	1.800,1	14,93
Sumatera Barat	234,2	10,55	238,2	10,37	472,4	10,46
Riau	382,2	13,19	362,2	13,05	744,4	13,12
Jambi	163,4	12,30	161,7	12,61	325,1	12,45
Sumatera Selatan	694,6	20,92	684,7	20,93	1.379,3	20,92
Bengkulu	176,3	22,44	168,8	22,35	345,1	22,39
Lampung	803,0	21,97	758,7	22,48	1.561,7	22,22
Bangka Belitung	46,5	8,90	45,3	9,26	91,8	9,07
DKI Jakarta	153,9	3,52	123,2	2,83	277,1	3,18
Jawa Barat	2.350,8	12,09	2.303,4	12,12	4.654,2	12,10
Jawa Tengah	3.425,5	21,15	3.418,3	21,07	6.843,8	21,11
DI Yogyakarta	301,1	19,01	315,1	19,26	616,2	19,14
Jawa Timur	3.577,2	19,89	3.735,3	20,28	7.312,5	20,08
Banten	401,2	8,71	378,0	8,44	779,2	8,58
Bali	115,9	6,78	116,0	6,92	231,9	6,85
Nusa Tenggara Barat	479,2	24,76	552,4	25,95	1.031,6	25,38
Nusa Tenggara Timur	572,2	27,94	579,9	27,78	1.152,1	27,86
Kalimantan Barat	283,5	13,77	274,7	14,07	558,2	13,91
Kalimantan Tengah	98,9	10,26	95,2	10,63	194,1	10,44
Kalimantan Selatan	113,6	7,12	117,4	7,25	231,0	7,19
Kalimantan Timur	159,9	11,17	158,3	12,00	318,2	11,57
Sulawesi Utara	101,3	9,24	90,9	8,62	192,2	8,94
Sulawesi Tengah	250,4	21,75	235,9	21,63	486,3	21,69
Sulawesi Selatan	620,4	15,15	621,1	14,66	1.241,5	14,90
Sulawesi Tenggara	209,4	22,06	209,0	21,74	418,4	21,90
Gorontalo	129,6	29,56	129,5	28,47	259,1	29,01
Maluku	199,3	32,28	198,3	31,99	397,6	32,13
Maluku Utara	55,3	12,60	52,5	12,24	107,8	12,42
Papua	501,6	38,18	465,2	39,25	966,8	38,69
Indonesia	18.070,0	16,61	18.076,9	16,72	36.146,9	16,66

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.6.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2004
(Persentase terhadap total penduduk miskin nasional)

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	583,8	3,23	573,4	3,17	1.157,2	3,20
Sumatera Utara	885,8	4,90	914,3	5,06	1.800,1	4,98
Sumatera Barat	234,2	1,30	238,2	1,32	472,4	1,31
Riau	382,2	2,12	362,2	2,00	744,4	2,06
Jambi	163,4	0,90	161,7	0,89	325,1	0,90
Sumatera Selatan	694,6	3,84	684,7	3,79	1.379,3	3,82
Bengkulu	176,3	0,98	168,8	0,93	345,1	0,95
Lampung	803,0	4,44	758,7	4,20	1.561,7	4,32
Bangka Belitung	46,5	0,26	45,3	0,25	91,8	0,25
DKI Jakarta	153,9	0,85	123,2	0,68	277,1	0,77
Jawa Barat	2.350,8	13,01	2.303,4	12,74	4.654,2	12,88
Jawa Tengah	3.425,5	18,96	3.418,3	18,91	6.843,8	18,93
DI Yogyakarta	301,1	1,67	315,1	1,74	616,2	1,70
Jawa Timur	3.577,2	19,80	3.735,3	20,66	7.312,5	20,23
Banten	401,2	2,22	378,0	2,09	779,2	2,16
Bali	115,9	0,64	116,0	0,64	231,9	0,64
Nusa Tenggara Barat	479,2	2,65	552,4	3,06	1.031,6	2,85
Nusa Tenggara Timur	572,2	3,17	579,9	3,21	1.152,1	3,19
Kalimantan Barat	283,5	1,57	274,7	1,52	558,2	1,54
Kalimantan Tengah	98,9	0,55	95,2	0,53	194,1	0,54
Kalimantan Selatan	113,6	0,63	117,4	0,65	231,0	0,64
Kalimantan Timur	159,9	0,88	158,3	0,88	318,2	0,88
Sulawesi Utara	101,3	0,56	90,9	0,50	192,2	0,53
Sulawesi Tengah	250,4	1,39	235,9	1,30	486,3	1,35
Sulawesi Selatan	620,4	3,43	621,1	3,44	1.241,5	3,43
Sulawesi Tenggara	209,4	1,16	209,0	1,16	418,4	1,16
Gorontalo	129,6	0,72	129,5	0,72	259,1	0,72
Maluku	199,3	1,10	198,3	1,10	397,6	1,10
Maluku Utara	55,3	0,31	52,5	0,29	107,8	0,30
Papua	501,6	2,78	465,2	2,57	966,8	2,67
Indonesia	18.070,0	100,00	18.076,9	100,00	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.7.a. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin
Kepala Rumahtangga, Tahun 2004
(Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi)

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.024,8	88,56	132,4	11,44	1.157,2	100,00
Sumatera Utara	1.635,7	90,87	164,4	9,13	1.800,1	100,00
Sumatera Barat	410,8	86,96	61,6	13,04	472,4	100,00
Riau	692,6	93,04	51,8	6,96	744,4	100,00
Jambi	296,5	91,20	28,6	8,80	325,1	100,00
Sumatera Selatan	1.278,4	92,68	100,9	7,32	1.379,3	100,00
Bengkulu	324,4	94,00	20,7	6,00	345,1	100,00
Lampung	1.487,1	95,22	74,6	4,78	1.561,7	100,00
Bangka Belitung	83,7	91,18	8,1	8,82	91,8	100,00
DKI Jakarta	237,9	85,85	39,2	14,15	277,1	100,00
Jawa Barat	4.363,3	93,75	290,9	6,25	4.654,2	100,00
Jawa Tengah	6.269,1	91,60	574,7	8,40	6.843,8	100,00
DI Yogyakarta	558,1	90,57	58,1	9,43	616,2	100,00
Jawa Timur	6.609,4	90,38	703,1	9,62	7.312,5	100,00
Banten	705,3	90,52	73,9	9,48	779,2	100,00
Bali	226,1	97,50	5,8	2,50	231,9	100,00
Nusa Tenggara Barat	880,7	85,37	150,9	14,63	1.031,6	100,00
Nusa Tenggara Timur	1.068,6	92,75	83,5	7,25	1.152,1	100,00
Kalimantan Barat	524,2	93,91	34,0	6,09	558,2	100,00
Kalimantan Tengah	185,0	95,31	9,1	4,69	194,1	100,00
Kalimantan Selatan	205,7	89,05	25,3	10,95	231,0	100,00
Kalimantan Timur	299,6	94,15	18,6	5,85	318,2	100,00
Sulawesi Utara	179,8	93,55	12,4	6,45	192,2	100,00
Sulawesi Tengah	452,4	93,03	33,9	6,97	486,3	100,00
Sulawesi Selatan	1.111,8	89,55	129,7	10,45	1.241,5	100,00
Sulawesi Tenggara	368,1	87,98	50,3	12,02	418,4	100,00
Gorontalo	243,9	94,13	15,2	5,87	259,1	100,00
Maluku	366,3	92,13	31,3	7,87	397,6	100,00
Maluku Utara	105,2	97,59	2,6	2,41	107,8	100,00
Papua	924,7	95,65	42,1	4,35	966,8	100,00
Indonesia	33.119,2	91,62	3.027,7	8,38	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.7.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin
Kepala Rumahtangga. Tahun 2004
(Persentase terhadap total penduduk miskin nasional)

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	1.024,8	3,09	132,4	4,37	1.157,2	3,20
Sumatera Utara	1.635,7	4,94	164,4	5,43	1.800,1	4,98
Sumatera Barat	410,8	1,24	61,6	2,03	472,4	1,31
Riau	692,6	2,09	51,8	1,71	744,4	2,06
Jambi	296,5	0,90	28,6	0,94	325,1	0,90
Sumatera Selatan	1.278,4	3,86	100,9	3,33	1.379,3	3,82
Bengkulu	324,4	0,98	20,7	0,68	345,1	0,95
Lampung	1.487,1	4,49	74,6	2,46	1.561,7	4,32
Bangka Belitung	83,7	0,25	8,1	0,27	91,8	0,25
DKI Jakarta	237,9	0,72	39,2	1,29	277,1	0,77
Jawa Barat	4.363,3	13,17	290,9	9,61	4.654,2	12,88
Jawa Tengah	6.269,1	18,93	574,7	18,98	6.843,8	18,93
DI Yogyakarta	558,1	1,69	58,1	1,92	616,2	1,70
Jawa Timur	6.609,4	19,96	703,1	23,22	7.312,5	20,23
Banten	705,3	2,13	73,9	2,44	779,2	2,16
Bali	226,1	0,68	5,8	0,19	231,9	0,64
Nusa Tenggara Barat	880,7	2,66	150,9	4,98	1.031,6	2,85
Nusa Tenggara Timur	1.068,6	3,23	83,5	2,76	1.152,1	3,19
Kalimantan Barat	524,2	1,58	34,0	1,12	558,2	1,54
Kalimantan Tengah	185,0	0,56	9,1	0,30	194,1	0,54
Kalimantan Selatan	205,7	0,62	25,3	0,84	231,0	0,64
Kalimantan Timur	299,6	0,90	18,6	0,61	318,2	0,88
Sulawesi Utara	179,8	0,54	12,4	0,41	192,2	0,53
Sulawesi Tengah	452,4	1,37	33,9	1,12	486,3	1,35
Sulawesi Selatan	1.111,8	3,36	129,7	4,28	1.241,5	3,43
Sulawesi Tenggara	368,1	1,11	50,3	1,66	418,4	1,16
Gorontalo	243,9	0,74	15,2	0,50	259,1	0,72
Maluku	366,3	1,11	31,3	1,03	397,6	1,10
Maluku Utara	105,2	0,32	2,6	0,09	107,8	0,30
Papua	924,7	2,79	42,1	1,39	966,8	2,67
Indonesia	33.119,2	100,00	3.027,7	100,00	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.8. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga, Tahun 2004

Provinsi	(Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi)											
	Tidak/belum tamat SD		SD		SLTP		SLTA		Di atas SLTA		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darussalam	209,3	18,09	501,8	43,36	270,8	23,40	156,6	13,53	18,7	1,62	1.157,2	100,00
Sumatera Utara	381,5	21,19	641,7	35,65	452,0	25,11	298,6	16,59	26,3	1,46	1.800,1	100,00
Sumatera Barat	147,6	31,24	172,1	36,43	81,3	17,21	63,2	13,38	8,2	1,74	472,4	100,00
Riau	273,8	36,78	270,1	36,28	113,1	15,19	84,0	11,28	3,4	0,46	744,4	100,00
Jambi	104,7	32,21	121,3	37,31	58,3	17,93	37,1	11,41	3,7	1,14	325,1	100,00
Sumatera Selatan	403,4	29,25	606,1	43,94	195,7	14,19	157,6	11,43	16,5	1,20	1.379,3	100,00
Bengkulu	130,3	37,76	107,5	31,15	46,1	13,36	52,5	15,21	8,7	2,52	345,1	100,00
Lampung	613,8	39,30	606,9	38,86	208,2	13,33	123,3	7,90	9,5	0,61	1.561,7	100,00
Bangka Belitung	45,3	49,35	30,3	33,01	8,8	9,59	5,7	6,21	1,7	1,85	91,8	100,00
DKI Jakarta	64,9	23,42	83,4	30,10	68,5	24,72	60,3	21,76	0,0	0,00	277,1	100,00
Jawa Barat	1.450,7	31,17	2.397,3	51,51	452,5	9,72	317,5	6,82	36,2	0,78	4.654,2	100,00
Jawa Tengah	3.193,0	46,66	2.765,3	40,41	542,3	7,92	312,2	4,56	31,0	0,45	6.843,8	100,00
DI Yogyakarta	313,6	50,89	181,8	29,50	57,1	9,27	60,0	9,74	3,7	0,60	616,2	100,00
Jawa Timur	3.743,1	51,19	2.556,0	34,95	590,6	8,08	389,0	5,32	33,8	0,46	7.312,5	100,00
Banten	437,4	56,13	269,5	34,59	47,6	6,11	24,7	3,17	0,0	0,00	779,2	100,00
Bali	115,8	49,94	78,4	33,81	20,2	8,71	16,3	7,03	1,2	0,52	231,9	100,00
NTB	620,2	60,12	240,1	23,27	83,4	8,08	81,4	7,89	6,5	0,63	1.031,6	100,00
NTT	548,0	47,57	399,8	34,70	118,8	10,31	77,1	6,69	8,4	0,73	1.152,1	100,00
Kalimantan Barat	308,5	55,27	145,7	26,10	73,0	13,08	29,4	5,27	1,6	0,29	558,2	100,00
Kalimantan Tengah	15,9	8,19	101,8	52,45	51,4	26,48	21,9	11,28	3,1	1,60	194,1	100,00
Kalimantan Selatan	72,7	31,47	116,1	50,26	25,2	10,91	16,1	6,97	0,9	0,39	231,0	100,00
Kalimantan Timur	119,1	37,43	96,7	30,39	44,8	14,08	54,7	17,19	2,9	0,91	318,2	100,00
Sulawesi Utara	66,5	34,60	77,2	40,17	34,5	17,95	14,0	7,28	0,0	0,00	192,2	100,00
Sulawesi Tengah	125,5	25,81	225,5	46,37	79,2	16,29	50,8	10,45	5,3	1,09	486,3	100,00
Sulawesi Selatan	636,2	51,24	347,1	27,96	146,0	11,76	101,3	8,16	10,9	0,88	1.241,5	100,00
Sulawesi Tenggara	142,9	34,15	163,5	39,08	55,0	13,15	54,2	12,95	2,8	0,67	418,4	100,00
Gorontalo	114,0	44,00	109,3	42,18	22,0	8,49	13,4	5,17	0,4	0,15	259,1	100,00
Maluku	63,8	16,05	169,0	42,51	96,4	24,25	55,7	14,01	12,7	3,19	397,6	100,00
Maluku Utara	28,6	26,53	39,3	36,46	23,7	21,99	13,0	12,06	3,2	2,97	107,8	100,00
Papua	574,1	59,38	246,7	25,52	91,6	9,47	47,6	4,92	6,8	0,70	966,8	100,00
Indonesia	15.064,2	41,67	13.867,3	38,36	4.158,1	11,50	2.789,2	7,72	268,1	0,74	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.9. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Lapangan Pekerjaan Kepala Rumahtangga, Tahun 2004

(Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi)

Provinsi	Tidak Bekerja		Pertanian		Industri		Lainnya		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Darussalam	48,5	4,19	762,0	65,85	22,2	1,92	324,5	28,04	1.157,2	100,00
Sumatera Utara	69,4	3,86	1.113,3	61,85	79,9	4,44	537,5	29,86	1.800,1	100,00
Sumatera Barat	27,2	5,76	292,5	61,92	20,7	4,38	132,0	27,94	472,4	100,00
Riau	57,3	7,70	504,1	67,72	24,1	3,24	158,9	21,35	744,4	100,00
Jambi	28,1	8,64	181,8	55,92	17,3	5,32	97,9	30,11	325,1	100,00
Sumatera Selatan	92,7	6,72	883,3	64,04	38,9	2,82	364,4	26,42	1.379,3	100,00
Bengkulu	38,6	11,19	219,5	63,60	2,7	0,78	84,3	24,43	345,1	100,00
Lampung	137,3	8,79	1.096,8	70,23	51,2	3,28	276,4	17,70	1.561,7	100,00
Bangka Belitung	0,9	0,98	51,4	55,99	1,9	2,07	37,6	40,96	91,8	100,00
DKI Jakarta	65,7	23,71	0,0	0,00	35,1	12,67	176,3	63,62	277,1	100,00
Jawa Barat	377,6	8,11	1.826,7	39,25	404,8	8,70	2.045,1	43,94	4.654,2	100,00
Jawa Tengah	673,1	9,84	3.735,8	54,59	550,2	8,04	1.884,7	27,54	6.843,8	100,00
DI Yogyakarta	105,2	17,07	291,6	47,32	52,2	8,47	167,2	27,13	616,2	100,00
Jawa Timur	811,4	11,10	4.306,0	58,89	359,1	4,91	1.836,0	25,11	7.312,5	100,00
Banten	40,7	5,22	418,5	53,71	37,2	4,77	282,8	36,29	779,2	100,00
Bali	5,2	2,24	150,6	64,94	22,2	9,57	53,9	23,24	231,9	100,00
NTB	109,4	10,60	507,1	49,16	99,4	9,64	315,7	30,60	1.031,6	100,00
NTT	87,3	7,58	946,0	82,11	11,5	1,00	107,3	9,31	1.152,1	100,00
Kalimantan Barat	24,5	4,39	389,6	69,80	18,9	3,39	125,2	22,43	558,2	100,00
Kalimantan Tengah	0,0	0,00	153,1	78,88	4,7	2,42	36,3	18,70	194,1	100,00
Kalimantan Selatan	0,0	0,00	146,2	63,29	13,5	5,84	71,3	30,87	231,0	100,00
Kalimantan Timur	17,3	5,44	198,2	62,29	17,3	5,44	85,4	26,84	318,2	100,00
Sulawesi Utara	36,3	18,89	119,6	62,23	4,8	2,50	31,5	16,39	192,2	100,00
Sulawesi Tengah	0,0	0,00	370,5	76,19	25,2	5,18	90,6	18,63	486,3	100,00
Sulawesi Selatan	39,1	3,15	956,4	77,04	36,4	2,93	209,6	16,88	1.241,5	100,00
Sulawesi Tenggara	28,4	6,79	301,9	72,16	26,3	6,29	61,8	14,77	418,4	100,00
Gorontalo	18,2	7,02	187,6	72,40	8,8	3,40	44,5	17,17	259,1	100,00
Maluku	15,9	4,00	294,9	74,17	20,4	5,13	66,4	16,70	397,6	100,00
Maluku Utara	0,0	0,00	79,1	73,38	7,3	6,77	21,4	19,85	107,8	100,00
Papua	112,4	11,63	781,4	80,82	10,6	1,10	62,4	6,45	966,8	100,00
Indonesia	3.067,7	8,49	21.265,5	58,83	2.024,8	5,60	9.788,9	27,08	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 1.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah tangga, Tahun 2004

(Persentase terhadap total penduduk miskin provinsi)												
Provinsi	Tidak bekerja		Berusaha sendiri		Berusaha dibantu		Karyawan/buruh		Pekerja keluarga		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	(000)		(000)		(000)		(000)		(000)		(000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nanggroe Aceh Darussalam	48,5	4,19	817,3	70,63	51,5	4,45	234,7	20,28	5,2	0,45	1.157,2	100,00
Sumatera Utara	69,4	3,86	1.129,8	62,76	66,3	3,68	504,1	28,00	30,5	1,69	1.800,1	100,00
Sumatera Barat	27,2	5,76	263,1	55,69	20,9	4,42	159,5	33,76	1,7	0,36	472,4	100,00
Riau	57,3	7,70	440,3	59,15	22,8	3,06	224,0	30,09	0,0	0,00	744,4	100,00
Jambi	28,1	8,64	192,6	59,24	13,8	4,24	90,6	27,87	0,0	0,00	325,1	100,00
Sumatera Selatan	92,7	6,72	964,8	69,95	25,3	1,83	290,6	21,07	5,9	0,43	1.379,3	100,00
Bengkulu	38,6	11,19	220,0	63,75	7,5	2,17	77,7	22,52	1,3	0,38	345,1	100,00
Lampung	137,3	8,79	938,5	60,09	71,0	4,55	392,6	25,14	22,3	1,43	1.561,7	100,00
Bangka Belitung	0,9	0,98	57,4	62,53	1,7	1,85	31,4	34,20	0,4	0,44	91,8	100,00
DKI Jakarta	65,7	23,71	92,9	33,53	9,4	3,39	107,8	38,90	1,3	0,47	277,1	100,00
Jawa Barat	377,6	8,11	2.022,8	43,46	145,6	3,13	2.081,1	44,71	27,1	0,58	4.654,2	100,00
Jawa Tengah	673,1	9,84	3.647,7	53,30	119,7	1,75	2.371,4	34,65	31,9	0,47	6.843,8	100,00
DI Yogyakarta	105,2	17,07	322,6	52,35	11,2	1,82	171,6	27,85	5,6	0,91	616,2	100,00
Jawa Timur	811,4	11,10	3.735,9	51,09	203,9	2,79	2.526,5	34,55	34,8	0,48	7.312,5	100,00
Banten	40,7	5,22	461,2	59,19	22,7	2,91	249,8	32,06	4,8	0,62	779,2	100,00
Bali	5,2	2,24	148,5	64,04	5,7	2,46	72,0	31,05	0,5	0,22	231,9	100,00
Nusa Tenggara Barat	109,4	10,60	585,6	56,77	23,2	2,25	304,9	29,56	8,5	0,82	1.031,6	100,00
Nusa Tenggara Timur	87,3	7,58	949,7	82,43	11,2	0,97	96,5	8,38	7,4	0,64	1.152,1	100,00
Kalimantan Barat	24,5	4,39	375,0	67,18	7,8	1,40	140,2	25,12	10,7	1,92	558,2	100,00
Kalimantan Tengah	0,0	0,00	155,4	80,06	10,2	5,26	28,2	14,53	0,3	0,15	194,1	100,00
Kalimantan Selatan	0,0	0,00	168,6	72,99	9,9	4,29	51,9	22,47	0,6	0,26	231,0	100,00
Kalimantan Timur	17,3	5,44	186,6	58,64	11,1	3,49	103,0	32,37	0,2	0,06	318,2	100,00
Sulawesi Utara	36,3	18,89	112,9	58,74	4,4	2,29	38,6	20,08	0,0	0,00	192,2	100,00
Sulawesi Tengah	0,0	0,00	371,4	76,37	22,7	4,67	87,2	17,93	5,0	1,03	486,3	100,00
Sulawesi Selatan	39,1	3,15	1.024,6	82,53	20,9	1,68	147,5	11,88	9,4	0,76	1.241,5	100,00
Sulawesi Tenggara	28,4	6,79	339,4	81,12	12,9	3,08	30,1	7,19	7,6	1,82	418,4	100,00
Gorontalo	18,2	7,02	182,5	70,44	14,9	5,75	42,1	16,25	1,4	0,54	259,1	100,00
Maluku	15,9	4,00	299,3	75,28	29,9	7,52	51,5	12,95	1,0	0,25	397,6	100,00
Maluku Utara	0,0	0,00	87,1	80,80	1,6	1,48	19,1	17,72	0,0	0,00	107,8	100,00
Papua	112,4	11,63	755,7	78,17	4,2	0,43	82,3	8,51	12,2	1,26	966,8	100,00
Indonesia	3.067,7	8,49	21.049,2	58,23	983,9	2,72	10.808,5	29,90	237,6	0,66	36.146,9	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

BAB II. PENDIDIKAN

Ulasan Singkat

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan dituangkan dalam UUD 1945 dan GBHN dimana dinyatakan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa jauh kesempatan memperoleh pendidikan telah dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Beberapa indikator pendidikan disajikan pada Tabel 2.1 – Tabel 2.3.

Pada tahun 2004 Angka Melek Huruf di Indonesia untuk kelompok usia 15-24 tahun yang tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta (99,73 persen) dan Kalimantan Tengah (99,73 persen). Sementara itu yang terendah terdapat di provinsi Papua yaitu sebesar 82,98 persen. Sedangkan untuk kelompok usia 15-55 tahun yang tertinggi ada di provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 99,35 persen dan terendah terdapat di provinsi Papua yaitu sebesar 74,80 persen. Secara total yaitu pada kelompok usia 15+ Angka Melek Huruf tertinggi ada di provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 99,15 persen dan terendah ada di provinsi Papua yaitu sebesar 74,22 persen.

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS pada kelompok usia 7-12 tahun relatif sudah cukup merata di seluruh provinsi yaitu sudah mencapai lebih dari 90 persen kecuali untuk provinsi Papua yang hanya sebesar 86,64 persen pada tahun 2004. Berbeda dengan kelompok usia 7-12, APS pada kelompok usia 13-15 tahun terlihat cukup bervariasi antar provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2004 tercatat APS yang paling tinggi ada di provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,02 persen dan yang terendah tercatat di provinsi Gorontalo yaitu sebesar 70,00 persen.

Pada tahun 2004, angka putus sekolah di Indonesia untuk kelompok usia 7-12 tahun adalah sebesar 0,99 persen dan kelompok usia 13-15 tahun adalah sebesar 4,67 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 1,14 persen (usia 7-12 tahun) dan 5,08 persen (usia 13-15 tahun). Beberapa provinsi yang mencatat angka putus sekolah usia 13-15 tahun yang tinggi ada di Provinsi Gorontalo (15,87 persen), Bangka Belitung (10,42 persen), Sulawesi Selatan (9,72 persen), dan Nusa Tenggara Barat (9,69 persen). Sementara itu yang terendah terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,88 persen (usia 13-15 tahun).

Penjelasan Teknis

1. **Angka melek huruf (dewasa)** adalah proporsi seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Publikasi ini juga menyajikan angka melek huruf menurut kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan disini adalah melek huruf latin dan huruf lainnya.
2. **Angka partisipasi sekolah** adalah proporsi dari seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

3. **Angka putus sekolah** adalah proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama. Publikasi ini menyajikan angka putus sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat dianggap sebagai suatu insiden kemiskinan dimana tercermin dari ketidakmampuan rumah tangga tersebut dalam memenuhi kebutuhan minimum di bidang pendidikan.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 2.1.a. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah
Menurut Provinsi, Tahun 2004**

Miskin

Provinsi	Angka Melek Huruf			Angka Partisipasi Sekolah	
	15+	15 - 24 th	15-55 th	7 - 12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	94,57	99,30	96,14	97,86	93,11
Sumatera Utara	94,19	97,18	95,66	96,66	81,28
Sumatera Barat	93,92	97,22	95,59	94,82	79,93
Riau	95,10	99,44	94,64	94,74	81,67
Jambi	94,48	98,16	95,12	96,18	83,76
Sumatera Selatan	95,39	98,55	96,85	96,11	72,77
Bengkulu	94,28	99,19	96,61	96,46	80,95
Lampung	92,13	99,15	94,90	94,84	73,61
Bangka Belitung	92,98	96,39	94,74	96,59	58,04
DKI Jakarta	97,02	100,00	98,21	95,50	78,82
Jawa Barat	92,72	98,91	95,03	93,58	63,01
Jawa Tengah	82,44	98,63	90,50	95,95	70,69
DI Yogyakarta	77,22	97,60	89,59	97,88	91,52
Jawa Timur	77,38	97,49	84,75	94,91	71,95
Banten	88,11	96,80	89,51	92,85	59,70
Bali	74,84	93,50	83,33	93,90	65,12
Nusa Tenggara Barat	72,32	91,53	74,48	92,38	66,99
Nusa Tenggara Timur	81,67	93,56	86,92	90,98	71,15
Kalimantan Barat	83,45	96,57	86,40	92,25	77,78
Kalimantan Tengah	94,06	99,70	96,46	98,79	82,71
Kalimantan Selatan	92,54	98,12	93,20	95,42	71,75
Kalimantan Timur	88,56	97,80	90,74	94,88	72,34
Sulawesi Utara	97,82	98,59	97,85	94,74	71,11
Sulawesi Tengah	92,96	97,11	94,64	92,79	65,88
Sulawesi Selatan	74,84	91,97	80,50	86,41	59,91
Sulawesi Tenggara	88,13	97,03	89,79	90,21	68,57
Gorontalo	92,13	94,06	93,33	89,10	54,53
Maluku	97,20	99,15	98,77	95,52	89,21
Maluku Utara	93,67	97,34	94,11	94,87	75,75
Papua	55,97	71,02	56,89	76,75	64,53
Indonesia	84,68	96,96	89,45	93,96	71,81

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 2.1.b. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Tidak Miskin Menurut Provinsi, Tahun 2004

Tidak Miskin

Provinsi	Angka Melek Huruf			Angka Partisipasi Sekolah	
	15+	15 - 24 th	15-55 th	7 - 12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	96,09	99,49	97,65	99,17	96,12
Sumatera Utara	97,01	99,50	98,63	97,90	92,33
Sumatera Barat	95,92	99,41	97,76	97,49	90,14
Riau	96,57	99,32	97,22	97,84	90,95
Jambi	95,90	99,46	96,66	97,23	86,65
Sumatera Selatan	95,76	98,95	97,19	97,63	86,89
Bengkulu	94,19	99,19	96,66	97,74	89,80
Lampung	93,32	99,50	96,37	97,37	87,94
Bangka Belitung	93,56	98,24	96,07	95,10	79,68
DKI Jakarta	98,34	99,72	98,96	98,54	93,35
Jawa Barat	94,11	99,60	96,55	97,04	80,88
Jawa Tengah	87,72	99,48	94,34	98,76	88,35
DI Yogyakarta	87,51	99,94	96,28	99,06	95,82
Jawa Timur	86,17	98,88	91,81	98,24	88,32
Banten	94,50	99,58	96,20	97,45	85,12
Bali	86,22	98,67	93,08	98,57	88,60
Nusa Tenggara Barat	78,20	96,48	83,09	95,77	80,25
Nusa Tenggara Timur	86,26	96,95	92,22	94,33	80,18
Kalimantan Barat	88,89	98,09	92,20	96,08	83,94
Kalimantan Tengah	96,48	99,73	97,49	98,36	89,30
Kalimantan Selatan	94,93	99,05	96,44	96,82	79,36
Kalimantan Timur	95,72	99,29	97,12	98,18	93,84
Sulawesi Utara	99,24	99,52	99,47	96,93	86,76
Sulawesi Tengah	94,78	99,01	96,53	97,35	82,22
Sulawesi Selatan	86,04	96,89	90,73	95,19	76,64
Sulawesi Tenggara	91,35	98,09	94,60	96,46	84,89
Gorontalo	95,48	98,51	96,33	93,13	72,58
Maluku	98,01	99,42	98,96	98,26	94,41
Maluku Utara	95,36	97,63	96,97	97,18	90,51
Papua	82,70	89,14	83,19	94,13	87,96
Indonesia	91,39	99,04	95,03	97,52	86,37

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

**Tabel 2.1.c. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah
Menurut Provinsi, Tahun 2004**

Miskin + Tidak Miskin

Provinsi	Angka Melek Huruf			Angka Partisipasi Sekolah	
	15+	15 - 24 th	15-55 th	7 - 12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	95,69	99,44	97,24	98,67	94,99
Sumatera Utara	96,64	99,16	98,23	97,64	90,28
Sumatera Barat	95,73	99,19	97,55	97,11	88,73
Riau	96,41	99,33	96,93	97,27	89,29
Jambi	95,76	99,31	96,50	97,06	86,23
Sumatera Selatan	95,69	98,86	97,12	97,24	83,58
Bengkulu	94,21	99,19	96,65	97,43	87,83
Lampung	93,08	99,42	96,07	96,69	84,35
Bangka Belitung	93,51	98,03	95,94	95,30	77,25
DKI Jakarta	98,31	99,73	98,95	98,40	92,61
Jawa Barat	93,96	99,51	96,39	96,50	78,16
Jawa Tengah	86,72	99,30	93,61	98,04	84,30
DI Yogyakarta	85,78	99,63	95,19	98,77	95,02
Jawa Timur	84,54	98,61	90,52	97,43	84,63
Banten	93,98	99,32	95,67	96,88	81,89
Bali	85,52	98,33	92,47	98,11	86,36
Nusa Tenggara Barat	76,85	95,27	81,08	94,67	76,47
Nusa Tenggara Timur	85,16	96,08	90,91	93,23	77,49
Kalimantan Barat	88,18	97,87	91,45	95,42	82,91
Kalimantan Tengah	96,23	99,73	97,38	98,42	88,41
Kalimantan Selatan	94,76	98,97	96,21	96,68	78,56
Kalimantan Timur	94,97	99,11	96,46	97,66	90,70
Sulawesi Utara	99,15	99,45	99,35	96,68	85,41
Sulawesi Tengah	94,41	98,56	96,14	96,04	77,65
Sulawesi Selatan	84,49	96,15	89,29	93,34	73,54
Sulawesi Tenggara	90,73	97,87	93,67	94,82	80,80
Gorontalo	94,66	97,39	95,57	91,53	67,00
Maluku	97,78	99,33	98,90	97,17	92,25
Maluku Utara	95,16	97,59	96,64	96,79	88,33
Papua	74,22	82,98	74,80	86,64	78,31
Indonesia	90,38	98,71	94,20	96,77	83,49

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

**Tabel 2.2. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 7-12 Tahun
Menurut Provinsi, Tahun 2004**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,29	0,17	0,21
Sumatera Utara	0,82	0,72	0,74
Sumatera Barat	1,70	0,92	1,03
Riau	1,71	0,47	0,69
Jambi	0,83	0,95	0,93
Sumatera Selatan	1,93	0,96	1,21
Bengkulu	1,48	0,48	0,73
Lampung	1,66	0,56	0,86
Bangka Belitung	0,53	2,46	2,21
DKI Jakarta	0,71	0,65	0,66
Jawa Barat	2,23	0,83	1,04
Jawa Tengah	1,40	0,47	0,70
DI Yogyakarta	1,17	0,22	0,46
Jawa Timur	1,54	0,52	0,76
Banten	1,68	0,76	0,87
Bali	2,64	0,74	0,92
Nusa Tenggara Barat	2,74	1,22	1,71
Nusa Tenggara Timur	1,52	1,53	1,53
Kalimantan Barat	2,55	1,20	1,43
Kalimantan Tengah	0,46	0,37	0,38
Kalimantan Selatan	1,60	1,07	1,12
Kalimantan Timur	1,27	0,79	0,86
Sulawesi Utara	2,73	2,14	2,21
Sulawesi Tengah	2,56	1,31	1,66
Sulawesi Selatan	3,82	1,81	2,22
Sulawesi Tenggara	3,84	1,51	2,12
Gorontalo	2,23	3,66	3,12
Maluku	1,09	0,63	0,81
Maluku Utara	2,56	0,09	0,51
Papua	1,39	0,52	0,85
Indonesia	1,72	0,79	0,99

Sumber: Diolah dari Susenas Kor Tahun 2004

**Tabel 2.3. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15 Tahun
Menurut Provinsi, Tahun 2004**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,25	0,77	1,32
Sumatera Utara	8,51	2,58	3,68
Sumatera Barat	11,65	5,09	6,02
Riau	7,04	3,22	3,89
Jambi	5,79	5,00	5,12
Sumatera Selatan	9,93	4,13	5,45
Bengkulu	7,51	3,50	4,38
Lampung	8,15	2,68	3,99
Bangka Belitung	17,24	9,65	10,42
DKI Jakarta	13,82	1,74	2,41
Jawa Barat	10,08	3,40	4,34
Jawa Tengah	8,01	1,82	3,15
DI Yogyakarta	0,79	0,90	0,88
Jawa Timur	7,82	2,66	3,75
Banten	12,40	2,43	3,59
Bali	14,15	3,26	4,26
Nusa Tenggara Barat	14,11	7,95	9,69
Nusa Tenggara Timur	12,74	7,63	9,16
Kalimantan Barat	12,24	6,82	7,77
Kalimantan Tengah	2,36	2,09	2,12
Kalimantan Selatan	10,46	6,99	7,35
Kalimantan Timur	10,06	2,19	3,26
Sulawesi Utara	16,12	8,09	8,79
Sulawesi Tengah	14,72	7,40	9,39
Sulawesi Selatan	17,16	8,03	9,72
Sulawesi Tenggara	14,93	6,82	8,84
Gorontalo	23,95	11,90	15,87
Maluku	4,00	1,66	2,63
Maluku Utara	11,08	4,34	5,32
Papua	10,76	2,97	5,94
Indonesia	9,45	3,54	4,67

Sumber: Diolah dari Susenas Kor Tahun 2004

Catatan: Tahun 2002 tidak tersedia untuk provinsi NAD

BAB III. KETENAGAKERJAAN

Ulasan Singkat

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Karenanya persaingan di dunia ketenagakerjaan tidak dapat dihindarkan, karena bagaimanapun mereka yang memiliki kualifikasi lebih baik tentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Problematika inilah yang tampaknya masih menjadi perhatian pemerintah dimana bertambahnya tenaga kerja yang tersedia tidak diikuti oleh makin luasnya lapangan kerja yang akan menampungnya. Pemerataan kesempatan kerja bagi setiap penduduk sangatlah penting karenanya menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan. Untuk itu data mengenai indikator ketenagakerjaan sangatlah diperlukan bagi perencanaan di bidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang disajikan disini meliputi: penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja, serta pekerja informal.

Informasi mengenai penduduk bekerja ditunjukkan pada Tabel 3.1. – Tabel 3.2. Pada tahun 2004 persentase penduduk yang bekerja < 42 jam yang tertinggi ada di provinsi Papua yaitu sebesar 80,69 persen, dan terendah ada di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 34,74 persen. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja < 36 jam yang tertinggi ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 54,33 persen dan terendah ada di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 11,30 persen. Sementara itu untuk persentase penduduk yang bekerja < 15 tertinggi ada di provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 11,75 persen dan terendah ada di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 1,67 persen.

Sementara itu, indikator lain yaitu pekerja sektor informal (Tabel 3.2), berdasarkan penghitungan dari data Susenas pekerja sektor informal sebesar 67,5 persen pada tahun 2003 dan menurun menjadi 65,8 persen pada tahun 2004. Angka tertinggi tercatat ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 88,4 persen tahun 2003 dan 86,0 persen pada tahun 2004. Sedangkan yang terendah tercatat di DKI Jakarta yaitu 29,4 persen di tahun 2003 dan 27,3 persen pada tahun 2004.

Penjelasan Teknis

1. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Publikasi ini menyajikan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja menurut jumlah jam kerja dalam seminggu yang lalu (dikelompokkan ke dalam < 42 jam, < 36 jam, dan < 15 jam).
2. **Pekerja informal** adalah penduduk yang bekerja dengan status/kedudukan pekerjaannya sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/ tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tidak dibayar.
3. Angka yang disajikan untuk indikator ketenagakerjaan adalah tahun 2003-2004.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Per Minggu Tahun 2004

Provinsi	< 42 jam	< 36 jam	< 15 jam
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	67,91	41,63	5,43
Sumatera Utara	60,95	35,48	4,83
Sumatera Barat	61,37	38,68	4,78
Riau	52,51	30,2	3,89
Jambi	66,22	39,3	3,38
Sumatera Selatan	69,2	43,02	3,44
Bengkulu	60,64	34,26	3,23
Lampung	61,29	37,23	4,3
Bangka Belitung	66,7	42,53	6,59
DKI Jakarta	34,74	11,3	1,67
Jawa Barat	49,75	29,11	3,83
Jawa Tengah	58,06	38,8	6,68
DI Yogyakarta	55,05	33,9	6,23
Jawa Timur	61,68	43,65	7,96
Banten	52,86	26,51	4,38
Bali	52,69	34,27	5,73
Nusa Tenggara Barat	67,01	49,8	10,81
Nusa Tenggara Timur	80,54	54,33	6,99
Kalimantan Barat	62,5	39,89	4,29
Kalimantan Tengah	58,84	31,2	1,84
Kalimantan Selatan	61,86	38,75	5,17
Kalimantan Timur	50,31	24,69	2,81
Sulawesi Utara	62,2	35,61	4,73
Sulawesi Tengah	68,17	43,74	6,64
Sulawesi Selatan	69,38	50,29	11,75
Sulawesi Tenggara	66,78	45,16	8,38
Gorontalo	62,29	39,6	7,37
Maluku	71,49	37,17	2,3
Maluku Utara	73,3	46,37	7,49
Papua	80,69	52,08	4,84
Indonesia	58,69	37,13	5,73

Sumber : Diolah dari Susenas Kor 2004

**Tabel 3.2. Persentase Pekerja Informal Menurut Provinsi,
Tahun 2003 dan Tahun 2004**

Provinsi	2003	2004
(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	76,4	72,7
Sumatera Utara	66,6	63,9
Sumatera Barat	70,6	68,6
Riau	58,5	54,2
Jambi	70,8	70,6
Sumatera Selatan	79,8	77,2
Bengkulu	83,5	78,0
Lampung	80,8	76,3
Bangka Belitung	63,0	62,2
DKI Jakarta	29,4	27,3
Jawa Barat	61,9	58,8
Jawa Tengah	69,6	69,5
DI Yogyakarta	60,3	63,7
Jawa Timur	68,3	68,2
Banten	50,9	49,5
Bali	64,0	61,0
Nusa Tenggara Barat	79,2	79,5
Nusa Tenggara Timur	88,4	86,0
Kalimantan Barat	75,1	72,6
Kalimantan Tengah	78,7	74,9
Kalimantan Selatan	73,5	70,4
Kalimantan Timur	54,6	51,1
Sulawesi Utara	63,7	65,3
Sulawesi Tengah	78,4	77,1
Sulawesi Selatan	76,1	74,8
Sulawesi Tenggara	81,7	81,0
Gorontalo	74,3	70,1
Maluku	78,3	70,7
Maluku Utara	76,5	82,0
Papua	82,9	82,1
Indonesia	67,5	65,8

Sumber : Diolah dari Susenas Kor tahun 2003 dan tahun 2004

BAB IV. FERTILITAS, MORTALITAS DAN HARAPAN HIDUP

Ulasan Singkat

Pertambahan jumlah penduduk secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan penduduk, sedang mortalitas menjadi faktor pengurang laju pertumbuhan penduduk. Migrasi yang terdiri dari migrasi masuk maupun migrasi keluar dapat memberikan sumbangan positif maupun negatif terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Pada periode tahun 2002-2003, rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita (usia 15-49 tahun) Indonesia selama masa reproduksi (TFR) adalah sebesar 2,6. Dengan demikian, wanita Indonesia rata-rata akan melahirkan anak berkisar antara 2-3 orang anak. Sementara itu pada tahun 2002, angka harapan hidup penduduk Indonesia mencapai usia 66,2 tahun. Dari 1.000 kelahiran hidup yang terjadi di Indonesia yang meninggal adalah 35 bayi dan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun adalah 46 balita. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan TFR tertinggi dan Provinsi DI Yogyakarta mempunyai TFR terendah menurut hasil *Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS)* tahun 2002-2003.

Penjelasan Teknis

1. Angka kematian bayi (*infant mortality rate* = IMR) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.
2. Angka kematian balita (${}_5q_5$) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup.
3. Angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth* = e_0) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
4. Angka kelahiran total (*total fertility rate* = TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita (usia 15-49 tahun) selama masa reproduksi seandainya wanita tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat angka itu dihitung tanpa memperhatikan kelangsungan hidup wanita tersebut selama masa reproduksi. Penghitungan TFR dirumuskan sebagai berikut:

$$TFR = C \times \text{jumlah angka kelahiran menurut kelompok umur}$$

$$TFR = C \times \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

dimana:

C = interval umur.

i = kelompok umur 5 tahunan: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, dan 45-49.

Tabel 4.1. Angka Kematian Bayi (IMR), Angka Kematian Balita (${}_5q_5$),
Angka Harapan Hidup (e_0), dan Angka Fertilitas Total (TFR)
Menurut Provinsi, 2002-2003

Provinsi	IMR (2002-2003)	${}_5q_5$ (2002-2003)	e_0 (2002)	TFR (2003)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	67,7	-
Sumatera Utara	42	57	67,3	3,0
Sumatera Barat	48	59	66,1	3,2
Riau	43	60	68,1	3,2
Jambi	41	51	66,9	2,7
Sumatera Selatan	30	49	65,7	2,3
Bengkulu	53	68	65,4	3,0
Lampung	55	64	66,1	2,7
Kep. Bangka Belitung	43	47	65,6	2,4
DKI Jakarta	35	41	72,3	2,2
Jawa Barat	44	50	64,5	2,8
Jawa Tengah	36	44	68,9	2,1
DI Yogyakarta	20	23	72,4	1,9
Jawa Timur	43	52	66,0	2,1
Banten	38	56	62,4	2,6
Bali	14	19	70,0	2,1
Nusa Tenggara Barat	74	103	59,3	2,4
Nusa Tenggara Timur	59	73	63,8	4,1
Kalimantan Barat	47	63	64,4	2,9
Kalimantan Tengah	40	47	69,4	3,2
Kalimantan Selatan	45	57	61,3	3,0
Kalimantan Timur	42	50	69,4	2,8
Sulawesi Utara	25	33	70,9	2,6
Sulawesi Tengah	52	71	63,3	3,2
Sulawesi Selatan	47	72	68,6	2,6
Sulawesi Tenggara	67	92	65,1	3,6
Gorontalo	77	97	64,2	2,8
Maluku	-	-	65,5	-
Maluku Utara	-	-	63,0	-
Papua	-	-	65,2	-
Indonesia	35	46	66,2	2,6

Sumber : BPS (2003), *Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS)*, 2002-2003

BAB V. KESEHATAN

Ulasan Singkat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masyarakat tersebut karena masyarakat yang sehatlah yang mampu berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi kesehatan dapat ditinjau dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Beberapa indikator kesehatan di tingkat individu adalah seperti pemberian imunisasi pada balita, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, dan keikutsertaan KB.

Tabel 5.1. menjelaskan tentang pemberian imunisasi terhadap balita menurut provinsi pada tahun 2004. Secara nasional balita yang telah menerima imunisasi BCG pada tahun 2004 tercatat sebesar 88,38 persen. Balita yang telah menerima imunisasi DPT dan polio masing-masing tercatat sebesar 86,54 persen dan 88,12 persen. Sedangkan balita yang telah menerima imunisasi campak 77,20 persen dan balita yang telah menerima imunisasi hepatitis-B sebesar 74,08 persen.

Dilihat menurut propinsi, dapat diketahui bahwa di semua propinsi tercatat balita yang telah menerima imunisasi BCG, DPT, polio dan campak adalah di atas 60 persen. Sedangkan balita yang telah menerima imunisasi hepatitis-B tercatat ada empat provinsi yang masih di bawah 60 persen, yaitu Provinsi Sumatera Utara (56,23 persen), Provinsi Banten (55,80 persen), Provinsi Maluku Utara (52,05 persen), dan Provinsi Maluku (42,86 persen).

Penjelasan Teknis

1. **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.
2. Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi adalah pelayanan proses persalinan. Keberhasilan proses persalinan sangat tergantung kepada petugas atau tenaga penolong yang menanganinya. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. Oleh karena itu, data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.
3. **Alat atau cara Keluarga Berencana (KB):**
 - a) Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi
 - b) Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi
 - c) AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim)/IUD/spiral
 - d) Suntikan KB
 - e) Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (alat kontrasepsi bawah kulit)
 - f) Pil KB
 - g) Kondom/karet KB
 - h) Intravag/tissue/kondom wanita
 - i) Alat/cara KB tradisional, antara lain: pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, tidak campur (puasa), jamu, urut.

Tabel 5.1.a Persentase Balita yang Telah Diimunisasi menurut Provinsi, Tahun 2004

Miskin

Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	64,66	65,50	75,82	66,39	51,46
Sumatera Utara	66,34	60,65	67,52	51,58	45,38
Sumatera Barat	82,78	81,65	82,46	71,20	70,23
Riau	82,32	82,05	83,74	75,04	67,29
Jambi	82,85	81,47	82,05	70,41	56,14
Sumatera Selatan	84,74	82,96	82,90	75,02	67,38
Bengkulu	90,30	85,57	87,71	79,59	78,92
Lampung	88,91	85,87	89,99	76,54	75,32
Bangka Belitung	59,73	60,46	69,26	47,03	46,18
DKI Jakarta	91,89	88,65	85,04	77,23	79,91
Jawa Barat	84,61	81,55	85,28	72,91	68,24
Jawa Tengah	93,72	92,31	92,79	81,15	77,18
DI Yogyakarta	99,00	97,43	96,29	85,86	91,14
Jawa Timur	82,53	80,42	83,50	72,54	70,56
Banten	52,20	58,50	62,04	39,21	30,30
Bali	90,38	86,67	89,84	75,64	83,62
Nusa Tenggara Barat	86,56	85,66	86,80	71,86	71,77
Nusa Tenggara Timur	79,59	78,69	79,02	70,67	67,71
Kalimantan Barat	74,57	73,55	74,00	60,40	59,52
Kalimantan Tengah	80,84	81,21	80,35	64,75	65,99
Kalimantan Selatan	75,09	73,40	74,47	61,58	54,89
Kalimantan Timur	83,12	81,85	82,20	70,96	69,64
Sulawesi Utara	90,01	87,27	86,25	83,50	77,97
Sulawesi Tengah	82,85	78,61	82,37	68,86	67,62
Sulawesi Selatan	75,76	72,94	73,18	62,17	59,62
Sulawesi Tenggara	89,77	87,34	87,46	80,34	81,70
Gorontalo	79,10	86,02	88,96	69,91	71,06
Maluku	49,01	58,58	68,42	53,72	27,82
Maluku Utara	45,55	46,64	52,26	47,82	35,56
Papua	76,58	75,78	76,21	66,81	59,29
Indonesia	82,14	80,45	82,89	70,99	66,95

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 5.1.b. Persentase Balita yang Telah Diimunisasi menurut Provinsi, Tahun 2004

Tidak Miskin

Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	79,40	79,24	86,37	77,59	69,37
Sumatera Utara	79,20	75,31	79,33	64,49	58,71
Sumatera Barat	88,32	84,50	85,69	72,72	74,90
Riau	88,52	86,92	89,50	78,76	74,93
Jambi	90,98	88,61	89,58	79,62	73,03
Sumatera Selatan	91,71	90,69	89,91	80,15	73,72
Bengkulu	92,14	91,20	91,32	84,85	83,38
Lampung	92,81	91,20	92,80	83,53	82,56
Bangka Belitung	87,56	83,16	86,82	74,88	78,22
DKI Jakarta	96,98	94,64	93,63	84,76	89,01
Jawa Barat	91,50	89,77	91,49	81,60	75,97
Jawa Tengah	95,20	93,81	94,19	82,63	81,47
DI Yogyakarta	98,37	97,81	97,56	87,20	91,61
Jawa Timur	91,22	88,89	89,92	80,06	81,24
Banten	82,33	82,05	84,22	69,45	59,19
Bali	96,92	95,41	95,71	84,60	90,09
Nusa Tenggara Barat	88,26	87,24	89,38	78,93	73,74
Nusa Tenggara Timur	91,29	90,23	91,04	81,62	78,87
Kalimantan Barat	84,06	82,87	84,03	70,88	67,61
Kalimantan Tengah	88,65	87,36	88,29	79,35	74,34
Kalimantan Selatan	87,78	84,96	85,80	75,27	69,64
Kalimantan Timur	94,19	92,27	92,73	82,72	82,86
Sulawesi Utara	95,68	93,64	93,17	87,32	77,19
Sulawesi Tengah	85,74	82,62	85,27	74,73	71,84
Sulawesi Selatan	85,62	83,31	83,88	74,63	73,46
Sulawesi Tenggara	89,53	87,59	88,74	81,75	82,07
Gorontalo	94,54	91,22	92,39	84,45	84,76
Maluku	76,88	75,49	80,03	70,46	51,66
Maluku Utara	79,47	80,36	81,42	74,26	55,78
Papua	84,02	82,63	84,30	73,41	68,10
Indonesia	89,96	88,08	89,44	78,77	75,88

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 5.1.c. Persentase Balita yang Telah Diimunisasi menurut Provinsi, Tahun 2004

Miskin+Tidak Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	74,83	75,97	83,04	74,02	63,50
Sumatera Utara	76,81	72,58	77,13	62,09	56,23
Sumatera Barat	87,52	84,09	85,22	72,50	74,23
Riau	87,71	86,28	88,75	78,28	73,93
Jambi	89,79	87,57	88,48	78,28	70,56
Sumatera Selatan	89,92	88,71	88,11	78,84	72,10
Bengkulu	91,67	89,77	90,41	83,52	82,25
Lampung	91,89	89,94	92,14	81,88	80,85
Bangka Belitung	83,45	79,69	84,00	70,76	73,57
DKI Jakarta	96,78	94,41	93,29	84,43	88,65
Jawa Barat	90,47	88,54	90,52	80,32	74,84
Jawa Tengah	94,78	93,38	93,79	82,21	80,28
DI Yogyakarta	98,52	97,72	97,26	86,89	91,50
Jawa Timur	89,08	86,81	88,30	78,20	78,62
Banten	78,80	79,29	81,62	65,90	55,80
Bali	96,31	94,60	95,17	83,77	89,49
Nusa Tenggara Barat	87,57	86,59	88,46	76,62	72,85
Nusa Tenggara Timur	87,37	86,36	87,02	77,96	75,14
Kalimantan Barat	82,27	81,11	82,24	69,01	66,07
Kalimantan Tengah	87,48	86,44	87,09	77,16	73,09
Kalimantan Selatan	86,58	83,88	84,73	73,98	68,25
Kalimantan Timur	92,69	90,85	91,30	81,13	81,08
Sulawesi Utara	95,00	92,88	92,34	86,86	77,28
Sulawesi Tengah	84,87	81,41	84,39	72,95	70,56
Sulawesi Selatan	83,52	81,09	81,59	71,97	70,22
Sulawesi Tenggara	89,53	87,47	88,35	81,33	81,85
Gorontalo	89,17	89,41	91,20	79,39	80,00
Maluku	66,59	69,25	75,74	64,28	42,86
Maluku Utara	73,21	74,14	76,04	69,02	52,05
Papua	81,38	80,20	81,43	71,07	64,97
Indonesia	88,35	86,51	88,08	77,17	74,03

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

**Tabel 5.2. Persentase Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
menurut Provinsi, Tahun 2004**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	72,31	86,56	82,25
Sumatera Utara	70,80	86,67	83,71
Sumatera Barat	77,94	89,28	87,65
Riau	62,82	82,82	80,21
Jambi	62,12	73,72	72,02
Sumatera Selatan	61,16	74,26	70,89
Bengkulu	70,00	79,40	77,01
Lampung	59,31	74,41	70,85
Bangka Belitung	57,79	84,70	81,31
DKI Jakarta	91,26	97,85	97,62
Jawa Barat	39,74	64,07	60,51
Jawa Tengah	66,00	83,27	78,70
DI Yogyakarta	79,46	92,71	89,59
Jawa Timur	61,90	82,84	77,87
Banten	25,71	64,21	59,69
Bali	70,89	94,93	92,70
Nusa Tenggara Barat	48,14	63,47	58,73
Nusa Tenggara Timur	32,03	53,19	46,11
Kalimantan Barat	42,85	59,14	56,22
Kalimantan Tengah	56,59	70,12	68,09
Kalimantan Selatan	58,97	72,79	71,49
Kalimantan Timur	61,34	85,93	82,69
Sulawesi Utara	86,33	85,43	85,53
Sulawesi Tengah	51,17	66,72	62,01
Sulawesi Selatan	38,68	62,62	57,51
Sulawesi Tenggara	31,41	47,15	43,16
Gorontalo	53,71	62,35	59,35
Maluku	32,04	52,11	44,70
Maluku Utara	27,77	41,66	39,10
Papua	40,48	70,25	59,68
Indonesia	55,64	75,54	71,52

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

**Tabel 5.3. Persentase Pengguna Alat KB
menurut Provinsi, Tahun 2004**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	72,83	67,12	68,44
Sumatera Utara	73,10	69,94	70,28
Sumatera Barat	74,89	67,06	67,75
Riau	79,01	74,07	74,54
Jambi	82,69	75,88	76,54
Sumatera Selatan	76,53	74,97	75,27
Bengkulu	84,31	78,72	79,84
Lampung	76,62	76,89	76,84
Bangka Belitung	73,04	75,97	75,73
DKI Jakarta	84,76	70,46	70,83
Jawa Barat	75,59	72,47	72,80
Jawa Tengah	74,73	73,08	73,39
DI Yogyakarta	75,51	69,79	70,79
Jawa Timur	74,23	72,86	73,10
Banten	77,16	78,11	78,04
Bali	77,99	75,71	75,85
Nusa Tenggara Barat	69,49	68,60	68,81
Nusa Tenggara Timur	60,96	59,83	60,09
Kalimantan Barat	72,71	74,54	74,33
Kalimantan Tengah	77,64	79,98	79,75
Kalimantan Selatan	84,24	77,05	77,48
Kalimantan Timur	78,73	74,35	74,77
Sulawesi Utara	80,26	73,47	73,95
Sulawesi Tengah	71,22	70,77	70,86
Sulawesi Selatan	68,90	66,15	66,53
Sulawesi Tenggara	67,61	70,31	69,77
Gorontalo	77,31	72,04	73,34
Maluku	69,15	65,81	66,38
Maluku Utara	64,82	69,66	69,18
Papua	78,30	77,01	77,47
Indonesia	74,72	72,80	73,07

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

BAB VI. FASILITAS PERUMAHAN

Ulasan Singkat

Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota rumahtangga yang menempatinnya. Ada beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat antara lain: air bersih, ketersediaan listrik, dan tidak berlantai tanah.

Pada tahun 2004, secara nasional rumahtangga yang menggunakan air bersih adalah sebesar 57,06 persen. Lebih jauh dapat dilihat bahwa rumahtangga yang menggunakan air bersih terendah pada tahun 2004 tercatat ada di Provinsi Kalimantan Barat (16,68 persen) sedangkan yang terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta (95,14 persen).

Listrik tidak saja memiliki arti penting bagi kesehatan rumah namun berperan pula dalam meningkatkan aktivitas ekonomi rumahtangga. Pada tahun 2003, rumahtangga pengguna listrik tercatat sebesar 87,94 persen dan meningkat menjadi 89,02 persen pada tahun 2004. Apabila dikaji lebih jauh berdasarkan provinsi, pada tahun 2004 persentase rumahtangga pengguna listrik terendah terdapat di Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 37,57 persen. Di pulau Jawa dan Bali, rumahtangga pengguna listrik pada umumnya di atas 90 persen. Di Sumatera, pengguna listrik terendah tercatat di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 61,44 persen. Sedangkan provinsi lainnya yang rendah pengguna listriknya adalah Provinsi Papua (44,96 persen), Provinsi Maluku Utara (56,42 persen), dan Provinsi Gorontalo (59,14 persen).

Rumah berlantai tanah disamping tidak nyaman, juga buruk bagi kesehatan. Pada tahun 2004 masih terdapat sekitar 15,10 persen rumahtangga yang lantai rumah terluasnya adalah tanah. Jumlah rumahtangga yang mempunyai lantai rumah terluas dari tanah yang terbanyak tercatat ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 45,79 persen.

Penjelasan Teknis

1. **Rumahtangga pengguna air bersih** adalah persentase rumahtangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung (dengan jarak ke penampungan lebih dari 10 meter).
2. **Rumahtangga pengguna listrik** adalah persentase rumahtangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai sumber penerangan dalam memperlancar dan memberikan kenyamanan melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah dan sekitarnya.
3. **Lantai terluas dari tanah** adalah persentase rumahtangga yang lantai rumah terluas terbuat dari tanah.

Tabel 6.1.a. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih , Jamban Sendiri/Bersama dan Listrik, serta dengan Lantai Terluas dari Tanah, Tahun 2004

Miskin				
PROPINSI	AIR BERSIH	JAMBAN SENDIRI/BERSAMA	LISTRIK	LANTAI TANAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	30,61	64,64	82,61	12,24
Sumatera Utara	37,63	64,77	72,09	8,97
Sumatera Barat	33,26	48,90	58,82	4,65
Riau	14,51	76,98	55,37	6,25
Jambi	33,63	71,61	64,36	10,19
Sumatera Selatan	29,99	62,08	64,64	11,24
Bengkulu	28,72	55,27	63,76	10,18
Lampung	28,42	80,71	48,50	34,13
Bangka Belitung	22,00	43,46	76,57	9,99
DKI Jakarta	90,89	77,08	99,60	8,16
Jawa Barat	45,19	55,55	93,92	13,48
Jawa Tengah	51,24	51,21	93,76	52,61
DI Yogyakarta	43,83	78,13	95,46	26,33
Jawa Timur	52,65	58,30	93,82	38,03
Banten	43,66	32,08	78,08	19,36
Bali	47,76	41,89	87,09	26,71
Nusa Tenggara Barat	36,98	27,51	73,32	23,17
Nusa Tenggara Timur	34,62	70,40	23,65	57,09
Kalimantan Barat	12,58	47,07	57,41	6,13
Kalimantan Tengah	26,78	64,41	58,05	4,24
Kalimantan Selatan	53,79	51,66	73,93	3,78
Kalimantan Timur	30,38	71,67	77,27	7,05
Sulawesi Utara	50,43	67,78	86,51	19,57
Sulawesi Tengah	41,45	37,42	50,30	20,15
Sulawesi Tengah	34,14	42,11	59,08	5,68
Sulawesi Tenggara	42,03	57,48	36,76	20,92
Gorontalo	30,61	19,59	33,21	23,92
Maluku	47,81	30,53	59,66	26,54
Maluku Utara	12,59	36,51	45,24	11,99
Papua	7,86	34,67	13,99	28,71
Indonesia	42,55	55,60	78,87	28,75

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 6.1.b. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih , Jamban Sendiri/Bersama dan Listrik, serta dengan Lantai Terluas dari Tanah, Tahun 2004

Tidak Miskin				
PROPINSI	AIR BERSIH	JAMBAN SENDIRI/BERSAMA	LISTRIK	LANTAI TANAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	48,96	70,98	90,67	9,19
Sumatera Utara	58,26	81,83	90,12	3,72
Sumatera Barat	51,49	64,22	82,21	2,42
Riau	34,16	91,10	81,25	3,80
Jambi	43,03	78,15	72,93	6,38
Sumatera Selatan	41,28	74,98	70,47	11,76
Bengkulu	34,03	71,96	72,72	10,14
Lampung	44,40	88,62	64,19	22,64
Bangka Belitung	37,86	63,63	89,50	2,19
DKI Jakarta	95,00	94,72	100,00	3,76
Jawa Barat	60,43	76,17	98,15	6,92
Jawa Tengah	62,49	72,78	97,79	27,32
DI Yogyakarta	60,43	91,88	98,84	9,57
Jawa Timur	67,25	71,85	97,44	19,70
Banten	68,76	72,66	94,98	9,50
Bali	73,35	80,04	97,38	5,70
Nusa Tenggara Barat	45,28	47,41	83,36	14,26
Nusa Tenggara Timur	44,16	78,10	41,46	42,64
Kalimantan Barat	17,18	68,38	73,17	3,02
Kalimantan Tengah	39,34	70,76	68,21	3,55
Kalimantan Selatan	55,96	74,03	88,63	3,25
Kalimantan Timur	64,36	86,59	92,46	4,46
Sulawesi Utara	60,77	83,40	94,98	6,03
Sulawesi Tengah	49,22	56,69	70,35	12,54
Sulawesi Tengah	54,51	67,70	82,15	4,33
Sulawesi Tenggara	56,08	71,08	66,69	9,45
Gorontalo	44,21	50,66	66,74	9,43
Maluku	54,20	58,33	70,70	14,74
Maluku Utara	42,66	55,92	57,47	19,81
Papua	35,34	67,93	58,07	19,24
Indonesia	59,24	75,25	90,55	13,04

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

Tabel 6.1.c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih , Jamban Sendiri/Bersama dan Listrik, serta dengan Lantai Terluas dari Tanah, Tahun 2004

Miskin + Tidak Miskin				
PROPINSI	AIR BERSIH	JAMBAN SENDIRI/	LISTRIK	LANTAI TANAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	44,62	69,48	88,76	9,91
Sumatera Utara	55,84	79,83	88,01	4,33
Sumatera Barat	50,00	62,97	80,29	2,60
Riau	32,26	89,73	78,75	4,04
Jambi	42,18	77,56	72,15	6,72
Sumatera Selatan	39,39	72,83	69,50	11,67
Bengkulu	33,16	69,22	71,25	10,14
Lampung	41,59	87,23	61,44	24,66
Bangka Belitung	36,74	62,21	88,59	2,74
DKI Jakarta	94,91	94,33	99,60	3,85
Jawa Barat	58,99	74,23	97,75	7,54
Jawa Tengah	60,64	69,23	97,12	31,48
DI Yogyakarta	58,16	90,00	98,38	11,86
Jawa Timur	64,90	69,67	96,86	22,64
Banten	66,98	69,78	93,78	10,20
Bali	72,02	78,06	96,85	6,79
Nusa Tenggara Barat	43,56	43,28	81,28	16,11
Nusa Tenggara Timur	42,08	76,42	37,57	45,79
Kalimantan Barat	16,68	66,08	71,47	3,36
Kalimantan Tengah	38,22	70,19	67,31	3,61
Kalimantan Selatan	55,83	72,70	87,75	3,29
Kalimantan Timur	61,34	85,27	91,11	4,69
Sulawesi Utara	60,16	82,49	94,49	6,82
Sulawesi Tengah	47,78	53,12	66,63	13,95
Sulawesi Tengah	51,97	64,51	79,27	4,49
Sulawesi Tenggara	53,61	68,68	61,42	11,47
Gorontalo	41,13	43,61	59,14	12,72
Maluku	52,62	51,43	67,96	17,67
Maluku Utara	40,06	54,24	56,42	19,02
Papua	27,17	58,04	44,96	22,87
Indonesia	57,05	72,67	89,02	15,10

Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2004

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, 2002, *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2003, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2003, *Data Kemiskinan untuk Penghitungan Dana Alokasi Umum (laporan intern)*, BPS: Jakarta.

<http://www.bps.go.id>

BPS

Badan Pusat Statistik

JL. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Jakarta-10010

Telepon: 3841195, 3842508, 3810291 – 4, Telex: 45159, 45325, 45375, 45385

Fax: 3857046, E-mail: bpshq@bps.go.id, Homepage: <http://www.bps.go.id>